Humas Profit & Non Profit (Humas Pemerintah dan BUMN)

Perbedaan pokok antara fungsi humas dan tugas humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan (aspek komersial)

Menurut John D.Millett , humas/PR dalam dinas instansi/lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas utamanya, yaitu :

- Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keingingan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (*learning about public desire and aspiration*).
- Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendakai oleh pihak publiknya (*advising the public about what is should desire*).

- Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan publik dengan para aparat pemerintah (*ensuring satisfactory contact between public and government official*)
- Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan (*informing and about what an agency is doing*)

KEBERADAAN HUMAS PEMERINTAH

Keberadaan unit kehumasan disebuah instansi atau lembaga milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktifitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam maupun kepada masyarakat luar pada umumnya.

Fungsi pokok humas pemerintah Indonesia pada dasarnya, antara lain :

- mengamankan kebijaksanaan pemerintah
- memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat.

- menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak.
- berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jadi peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah/BUMN tersebut, menyangkut beberapa hal :

1. tugas secara taktis dalam jangka pendek, humas berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi kepada masyarakat umum, dan khalayak tertentu sebagai target sasarannya.

2. tugas strategis (jangka panjang) humas, yakni berperan secara aktif dalam proses mengambil keputusan (*decision making process*), memberikan sumbang saran, gagasan dan hingga ide-ide cemerlang serta kreatif dalam menyukseskan program kerja instansi/lembaga.

Pejabat humas tersebut harus memiliki kemampuan untuk menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya, sebagai berikut :

- kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan instansinya atau khalayak yang menjadi target sasarannya.
- kemampuan melakukan hubungan komunikasi timbal balik yang kreatif, dinamis, efektif, saling mendukung bagi kedua belah pihak yang menarik perhatian terhadap audiensinya.
- kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum (*opini public*) yang menguntungkan instansi/lembaganya.
- kemampuan untuk menjalin hubungan baik atau kerjasama, dan saling mempercayai dengan berbagai pihak yang terkait.